



**KONTESTASI NARASI KEBIJAKAN PUBLIK DI MEDIA ONLINE
TERHADAP PEMBERITAAN KLARIFIKASI PEMERINTAH ATAS
KRITIK BEM UGM**

*Contestation of Public Policy Narratives in Online Media Regarding
the News Coverage of Government Clarification on BEM UGM's Criticism*

**Ifazira Hawawi¹, Hafizh Daffa Al-Fakhri², Julius Christoforus Jae³,
Alda Ayu Putri Astuti⁴, La Ode Muhammad Erdin⁵, Malik Ibrahim⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Madiun

Email: mi747@ummad.ac.id

Abstract

This article examines the contestation of public policy narratives in online media through news coverage of government clarifications responding to BEM UGM's criticism. The study focuses on one issue cycle related to the Free Nutritious Meals policy and compares 13 online media outlets, each represented by one news text. Using Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's framing model, the study analyzes syntactical, script, thematic, and rhetorical structures in the texts. This research applies a qualitative descriptive method within a constructivist paradigm. The findings show three dominant framing tendencies. First, several media place government clarification as an ethical reminder about how criticism should be delivered. Second, one cluster frames clarification as a technical and moral defense of the policy. Third, several media place student criticism, humanitarian concerns, and democratic freedom at the center of the narrative.

Keywords: *BEM UGM's criticism, Framing Analysis, Government Policy, Online Media, Public Policy*

Abstrak

Artikel ini mengkaji kontestasi narasi kebijakan publik di media online melalui pemberitaan klarifikasi pemerintah atas kritik BEM UGM. Penelitian berfokus pada satu episode isu yang berkaitan dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis dan membandingkan 13 media online, masing-masing diwakili oleh satu teks berita. Dengan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian menelaah struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam teks berita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam paradigma konstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan tiga kecenderungan framing utama. Pertama, sejumlah media menempatkan klarifikasi pemerintah sebagai penegasan etika dalam menyampaikan kritik. Kedua, ada media yang membingkai klarifikasi sebagai pembelaan teknis dan moral atas kebijakan. Ketiga, beberapa media menempatkan kritik mahasiswa, isu kemanusiaan, dan ruang demokrasi sebagai pusat narasi.

Kata kunci: *Kritik BEM UGM, Framing, Kebijakan Pemerintah, Klarifikasi Pemerintah, Media Online*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial di Indonesia diramaikan oleh kontestasi narasi seputar kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Puncak

ketegangan terjadi ketika BEM UGM mengirimkan surat kepada UNICEF setelah tragedi bunuh diri anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur, yang menurut mereka mencerminkan kegagalan negara memprioritaskan hak dasar anak dibandingkan program-program simbolik (tempo, 2026). Kritik tersebut mendapat resonansi luas di platform X, TikTok, dan Instagram, memicu perdebatan publik tentang ruang demokrasi, etika kritik mahasiswa, dan legitimasi kebijakan pemerintah. Tidak lama setelah itu, pemerintah mulai mengedarkan klarifikasi, mulai dari bantahan teknis Wakil Kepala Badan Gizi Nasional hingga pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia bahwa pihak yang ingin meniadakan MBG berarti menentang hak asasi manusia (Firmansyah, 2026; Saubani, 2026).

Yang menarik dari episode ini bukanlah perdebatan substantif tentang gizi atau anggaran, melainkan bagaimana media online turut membentuk makna atas konflik tersebut. Media tidak sekadar melaporkan apa yang dikatakan BEM UGM dan dijawab pemerintah, tetapi memilih judul, menentukan siapa yang dikutip pertama, memilah fakta yang ditonjolkan, serta memilih diksi yang membawa muatan etika dan moral. Dalam ekosistem digital, proses konstruksi ini semakin menentukan karena berita bergerak cepat dan segera diproses publik sebagai rujukan untuk menilai tindakan negara. Media daring karena itu tidak hanya melaporkan kebijakan, tetapi juga ikut membentuk legitimasi kebijakan di ruang publik (Arianti et al., 2025)(Jayawinangun & Nugroho, 2025).

Urgensi meneliti framing media pada fase klarifikasi ini sangat mendesak. Fase inilah yang menentukan apakah suatu kebijakan publik masih memiliki ruang perbaikan atau telah dimenangkan sepihak di ruang publik. Jika tidak segera diteiti, proses hegemonik pemerintah dalam membatasi dampak kritik dan menata ulang persepsi publik akan berlangsung tanpa pengawasan akademik. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses pada informasi berimbang, sementara kritik mahasiswa mudah didiskreditkan. Dengan kata lain, ketiadaan penelitian pada momen kritis ini justru memperkuat asimetri informasi antara negara dan warga negara. Kebijakan publik seperti MBG yang menyangkut anggaran, pangan, pendidikan, dan hak dasar warga cenderung melahirkan kontestasi narasi, di mana yang dipertarungkan bukan hanya benar-salah program, tetapi juga definisi masalah, legitimasi aktor, dan nilai moral kebijakan tersebut.

Salah satu kerangka teoretik yang paling mumpuni untuk membaca kontestasi semacam ini adalah model (Pan & Kosicki, 1993). Berbeda dengan analisis isi biasa yang hanya menghitung frekuensi topik, model ini membaca berita sebagai konstruksi diskursif melalui empat struktur: sintaksis (headline, lead, kutipan, sumber), skrip (alur 5W+1H), tematik (koherensi, repetisi, sebab-akibat), dan retorik (diksi, metafora, label). Penelitian (aulia, 2022), (Anggelina et al., 2023) serta (Bramantyo et al., 2025) telah membuktikan efektivitas model ini untuk menelaah perbedaan orientasi media dalam memberitakan isu-isu kontroversial.

Penelitian tentang MBG sudah cukup banyak, dan setelah dibandingkan secara sistematis, posisi penelitian ini berbeda secara tegas dari studi-studi sebelumnya. (Vanti et al., 2024) menyoroti pemberitaan program makan gratis pada fase usulan awal, sementara penelitian ini fokus pada fase klarifikasi pasca-kritik mahasiswa. (Devi Triana & Amali, 2024) pertarungan framing pada isu pemotongan anggaran antara 2 media, sedangkan penelitian ini membahas

bagaimana pemerintahan membingkai ulang definisi masalah dari isu gizi menjadi etika kritik. (Juditha & Darmawan, 2026) menghubungkan framing MBG dengan sentimen netizen, tetapi tidak membandingkan variasi framing dalam satu episode isu sempit (20 hari, 13 media, 14 teks). (Novilia et al., 2025) menelaah kaitan framing dengan citra pemerintah daerah, bukan pada klarifikasi terhadap kritik mahasiswa. Dengan demikian, celah spesifik penelitian ini adalah: bagaimana media membingkai upaya pemerintah merebut kembali definisi masalah ketika sedang terdesak kritik publik dari mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana 14 teks berita dari 13 media online membingkai klarifikasi pemerintah atas kritik BEM UGM melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik menurut model Pan dan Kosicki (1993)? Jawaban atas pertanyaan ini akan menunjukkan apakah klarifikasi pemerintah ditempatkan sebagai respons kredibel, strategi legitimasi, penertiban etika kritik, pembelaan teknis program, atau bagian dari konflik yang lebih luas tentang hak dasar anak dan ruang demokrasi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan framing masing-masing media atas klarifikasi pemerintah, dan (2) membandingkan pola framing antarkelompok media untuk melihat kontestasi narasi kebijakan publik dalam pemberitaan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menempatkan penelitian pada dua pijakan konseptual utama. Pertama, penelitian menggunakan teori framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk membaca cara teks berita menyusun realitas. Kedua, penelitian memakai gagasan kontestasi narasi kebijakan publik di media online untuk menjelaskan mengapa klarifikasi pemerintah dan kritik mahasiswa harus dibaca sebagai perebutan makna, bukan sekadar pertukaran informasi.

Teori Framing Pan Dan Kosicki

(Pan & Kosicki, 1993) mengembangkan framing sebagai pendekatan untuk menganalisis wacana berita secara operasional. Pendekatan ini penting karena tidak berhenti pada identifikasi tema umum, tetapi menempatkan teks berita sebagai struktur yang dapat dibaca secara rinci. Berita dalam perspektif ini bukan jendela yang bening terhadap realitas. Berita merupakan hasil seleksi, penonjolan, dan penyusunan fakta yang dibentuk melalui interaksi sumber, jurnalis, organisasi media, dan konteks sosial. Karena itu, analisis framing memerlukan pembacaan terhadap unsur tekstual yang konkret.

Dalam model Pan dan Kosicki, struktur sintaksis menunjuk pada cara fakta disusun melalui headline, lead, latar, kutipan, sumber, dan penutup. Struktur ini penting karena bagian awal berita sering kali menentukan arah perhatian pembaca. Struktur skrip menunjuk pada pola pengisahan peristiwa melalui kelengkapan dan urutan unsur 5W+1H. Struktur tematik menunjuk pada cara fakta dihubungkan menjadi tema tertentu, termasuk koherensi antarparagraf, hubungan sebab akibat, penempatan detail, dan pola repetisi gagasan. Struktur retorik menunjuk pada penggunaan diksi, metafora, label, foto, atau unsur grafis untuk menekankan makna tertentu (Pan & Kosicki, 1993).

Bagi penelitian ini, keunggulan model Pan dan Kosicki terletak pada kemampuannya membaca perbedaan halus di antara media yang sama-sama

memberitakan isu serupa. Klarifikasi pemerintah dapat tampak netral pada level informasi permukaan, tetapi pada level struktur teks dapat mengandung kecenderungan tertentu. Penelitian (aulia, 2022) dan (Anggelina et al., 2023) menunjukkan bahwa perbedaan headline, pilihan sumber, dan elemen visual dapat menghasilkan arah framing yang berbeda walaupun isu yang diliput sama. Dengan demikian, model ini sesuai untuk menelaah bagaimana Detik.com, Republika, dan Tempo membangun makna atas kritik BEM UGM dan respons pemerintah terhadapnya.

Kontestasi Narasi Kebijakan Publik Di Media Online

Dalam isu kebijakan publik, media online berfungsi sebagai arena tempat aktor negara, masyarakat sipil, dan publik luas memperebutkan definisi masalah. Kontestasi narasi terjadi ketika aktor-aktor tersebut berusaha menegaskan versi makna yang dianggap paling sah. Pemerintah biasanya menekankan rasionalitas kebijakan, tujuan program, dan justifikasi moral. Sebaliknya, aktor masyarakat sipil cenderung menonjolkan risiko, ketidakadilan, atau kegagalan implementasi. Media kemudian memilih bagaimana kedua narasi itu dihadirkan, diseimbangkan, atau dipertentangkan. Dalam konteks kebijakan digital dan komunikasi publik, proses ini sangat menentukan pembentukan legitimasi kebijakan (Arianti et al., 2025).

Pada ruang media digital, kontestasi narasi berlangsung lebih cepat dan lebih terbuka. Berita online mudah dibagikan, dikutip, dan didiskusikan ulang di media sosial. Temuan (Jayawinangun & Nugroho, 2025) menunjukkan bahwa media digital berpengaruh terhadap pengetahuan politik, kesadaran politik, dan partisipasi pemilih muda. Temuan ini penting bagi penelitian ini karena polemik MBG juga beredar dalam ruang audiens muda, termasuk mahasiswa, yang aktif membaca, mengomentari, dan mendistribusikan ulang isu kebijakan. Dengan demikian, framing media atas kritik BEM UGM tidak hanya memengaruhi persepsi pembaca pasif, tetapi juga dapat menggerakkan percakapan politik lanjutan di ruang digital.

Dalam polemik MBG, klarifikasi pemerintah dapat dipahami sebagai tindakan komunikasi politik untuk memulihkan legitimasi kebijakan. Penelitian (Fahlevi & Nusa, 2026) menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi ruang kritik yang tajam terhadap komunikasi politik pemerintah. Dalam posisi itu, klarifikasi tidak cukup dibaca sebagai penjelasan faktual. Klarifikasi perlu dibaca sebagai usaha untuk mengatur ulang narasi, menetapkan batas interpretasi, dan mengembalikan otoritas negara di hadapan publik. Konsep kontestasi narasi kebijakan publik di media online membantu penelitian ini menjelaskan mengapa satu isu yang sama dapat dipahami secara berbeda, tergantung pada bagaimana media mengorganisasi kritik, sumber resmi, dan pesan moral di dalam teks berita.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang berita bukan sebagai cermin realitas yang netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui seleksi fakta, penekanan isu, dan strategi bahasa media.

Objek dan Sumber Data. Objek penelitian adalah pemberitaan media online tentang klarifikasi pemerintah atas kritik BEM UGM terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sumber data primer berupa 14 teks berita dari 13 media online: Detik.com, Inilah.com, JPNN.com, Merdeka.com, Media Indonesia,

ANTARA, IDN Times, VOI, SINDOnews, Republika (dua judul berita), Tempo, tvOneNews.com, dan Suara.com. Rentang pengambilan data 6–25 Februari 2026, yaitu sejak kritik BEM UGM mulai viral hingga klarifikasi pemerintah berkembang di berbagai media.

Teknik Sampling. Sampel ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria: (a) berita secara langsung terkait kritik BEM UGM, surat ke UNICEF, polemik MBG, atau klarifikasi pejabat; (b) dipublikasikan dalam periode isu yang sama; (c) dari setiap media diambil satu judul berita (kecuali Republika yang memiliki dua berita dengan fokus berbeda); (d) teks tersedia lengkap.

Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital dengan kata kunci: "BEM UGM", "MBG", "Makan Bergizi Gratis", "UNICEF", "kritik BEM UGM", "klarifikasi pemerintah", "teror Ketua BEM UGM", dan "respons Istana". Setiap berita yang memenuhi kriteria disimpan, dicatat identitasnya (nama media, judul, tanggal, URL), dan dimasukkan ke dalam matriks data awal.

Kerangka Analisis. Analisis data menggunakan model framing Pan dan Kosicki (1993) yang membedah teks berita ke dalam empat struktur. Keempat struktur tersebut dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Fokus Analisis Framing Pan dan Kosicki

Struktur	Elemen teks yang diamati	Fokus pembacaan
Sintaksis	Headline, lead, latar, kutipan, sumber, penutup	Bagaimana media menyusun fakta dan menentukan titik perhatian pembaca
Skrip	Urutan peristiwa dan kelengkapan 5W+1H	Bagaimana peristiwa diceritakan, bagian mana yang disorot dan diredam
Tematik	Koherensi antarparagraf, detail, hubungan sebab akibat, repetisi tema	Bagaimana media membangun tema dominan dan konsistensi narasi
Retoris	Pilihan diksi, label, metafora, foto, dan penekanan visual	Bagaimana media menegaskan makna, emosi, dan posisi ideologis

Sumber: Diadaptasi dari Pan dan Kosicki (1993).

Teknik Analisis Data. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pembacaan intensif seluruh korpus untuk memahami konteks isu. Kedua, pengodean berdasarkan empat struktur di atas pada setiap teks. Ketiga, interpretasi dan sintesis komparatif antarkelompok media.

Keabsahan Data. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan 14 teks dari media yang berbeda) dan ketekunan pengamatan (pembacaan berulang serta pencatatan sistematis). Seluruh proses didokumentasikan dalam arsip artikel, tabel kategorisasi, dan catatan analitis (audit

trail).

Pengelompokan Teks. Untuk memudahkan perbandingan, 14 teks dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok 1 (Detik.com, Inilah.com, JPNN.com, Merdeka.com, Media Indonesia, ANTARA, IDN Times, VOI, SINDOnews) menonjolkan respons Istana atau pejabat negara. Kelompok 2 (dua berita Republika) membingkai kritik sebagai narasi yang perlu dibantah atau diluruskan. Kelompok 3 (Tempo, tvOneNews.com, Suara.com) memberi ruang lebih besar pada sudut pandang BEM UGM, tragedi anak di NTT, dan problem hak dasar anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami bagaimana ketiga kelompok media membangun realitas yang berbeda atas isu yang sama, berikut disajikan perbandingan pada keempat struktur framing Pan dan Kosicki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Perbandingan Sintaksis

Tabel 2. Perbandingan Sintaksis Antar Kelompok Media

Indikator	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Aktor di depan judul	Istana, Mensesneg, DPR, aparat negara	BGN dan Menteri Piga	BEM UGM, Tiyo, UNICEF, tragedi anak NTT
Pola lead	Respons resmi, teror, imbauan etika	Bantahan, pelurusan, legitimasi moral kebijakan	Tragedi, aksi advokasi, ancaman terhadap pengkritik
Arah pembacaan awal	Negara sebagai pusat stabilisasi isu	Kritik sebagai narasi yang harus diluruskan	Kritik substantif atas kebijakan

Sumber: Diolah peneliti dari hasil analisis 14 teks berita.

Pada level sintaksis, perbedaan paling tegas terletak pada siapa yang ditempatkan sebagai aktor pertama di headline dan lead. Kelompok 1 secara utama, seperti terlihat pada headline "Ini Respons Istana" (Inilah.com) dan "Respons Istana Tanggapi Dugaan Teror" (SINDOnews). Pola ini mengarahkan pembaca untuk memahami isu dari perspektif negara sejak kalimat pertama. Kelompok 2 menempatkan pejabat BGN dan Menteri Piga sebagai aktor depan, dengan headline yang bersifat konfrontatif seperti "Wakil Kepala BGN Bantah Narasi BEM UGM" dan "Orang yang Mau Meniadakan MBG adalah Orang Menentang HAM". Sementara itu, Kelompok 3 justru menempatkan BEM UGM, Tiyo, atau tragedi anak NTT sebagai pintu masuk berita, seperti "BEM UGM Surati UNICEF" (Tempo) dan "MBG Jadi Percakapan Pemimpin Dunia" (tvOneNews.com).

Perbedaan aktor depan ini menunjukkan bahwa pertarungan narasi dimulai sejak judul. Kelompok 1 dan 2 membangun kerangka bahwa isu ini adalah persoalan yang perlu direspons atau diluruskan oleh negara, sedangkan Kelompok 3 membangun kerangka bahwa isu ini adalah persoalan kemanusiaan yang perlu disuarakan oleh mahasiswa. Arah pembacaan awal yang dihasilkan pun berbeda: Kelompok 1 mengarahkan pembaca pada stabilisasi isu oleh negara, Kelompok 2 pada pelurusan narasi yang dianggap keliru, dan Kelompok 3 pada pengenalan kritik substantif atas kebijakan.

Perbandingan Skrip

Tabel 3. Perbandingan Skrip Antar Kelompok Media

Indikator	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Unsur who yang diprioritaskan	Pejabat negara sebagai tokoh pembuka	Pejabat pembela MBG sebagai pusat narasi	BEM UGM, Tiyo, anak NTT lebih dahulu
Unsur what yang ditonjolkan	Respons, pengecekan, imbauan etika	Bantahan atas kritik, pembelaan MBG	Surat ke UNICEF, tragedi anak, teror
Unsur why yang ditekankan	Etika dan kepatutan dalam mengkritik	Alasan teknis dan moral (narasi keliru, menentang HAM)	Alasan kemanusiaan, hak anak, kegagalan prioritas negara
Pola how dan penutup	Janji "cek", penegasan hak kritik, disiplin adab	Pelurusan dan justifikasi kebijakan	Seruan advokasi, perluasan isu, penajaman konflik

Sumber: Diolah peneliti dari hasil analisis 14 teks berita.

Pada level skrip, ketiga kelompok membangun alur cerita yang berbeda secara fundamental. Kelompok 1 memulai cerita dari siapa yang memberi respons (pejabat negara), lalu apa yang direspon (teror terhadap Ketua BEM UGM), kemudian diikuti oleh imbauan etis. Alur ini berakhir dengan janji "cek" atau penegasan bahwa kritik diperbolehkan asalkan menjaga etika. Dengan alur seperti ini, pembaca diajak mengikuti proses administrasi negara dalam menangani isu, bukan mengikuti argumentasi substantif BEM UGM.

Kelompok 2 membangun alur yang berbeda: berita dimulai dari pernyataan pejabat BGN atau Menteri Piga, kemudian diarahkan untuk membantah tuduhan BEM UGM, dan ditutup dengan justifikasi kebijakan MBG. Alur ini bersifat defensif dan korektif, di mana kritik mahasiswa diposisikan sebagai sesuatu yang perlu diluruskan. Unsur mengapa dalam kelompok ini diisi dengan alasan teknis (kewajiban mitra membangun SPPG) atau alasan moral (menentang HAM).

Sebaliknya, Kelompok 3 membangun alur yang berpusat pada kronologi kemanusiaan. Berita dimulai dari tindakan BEM UGM (bersurat ke UNICEF), kemudian latar tragedi anak di NTT, kemudian kritik terhadap MBG, dan ditutup dengan seruan advokasi atau perluasan isu ke forum global. Alur ini memungkinkan pembaca untuk memahami mengapa BEM UGM mengkritik pemerintah, yaitu karena adanya "jurang besar" antara klaim dan realitas, serta "krisis prioritas kemanusiaan" yang mendasar.

Perbandingan Tematik

Tabel 4. Perbandingan Tematik Antar Kelompok Media

Indikator	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Ide utama	Etika kritik, tanggung jawab, respons resmi negara	Pembelaan MBG, delegitimasi kritik	Hak anak, kegagalan negara, kritik struktural
Posisi kritik	Diakui, tetapi	Diposisikan	Diposisikan

BEM	dibatasi norma kepastasan	sebagai tudingan yang perlu dibantah	sebagai alarm moral dan politik yang sah
Posisi pemerintah dan MBG	Penengah dan pengelola ketertiban wacana	Pihak yang benar, MBG yang harus dibela	Pihak yang dituntut menjawab substansi masalah
Cakupan masalah	Dipersempit pada etika, teror, reaksi institusi	Dipersempit pada validitas kritik dan legitimasi MBG	Diperluas ke hak dasar, tragedi anak, forum internasional

Sumber: Diolah peneliti dari hasil analisis 14 teks berita.

Pada level tematik, perbedaan yang paling signifikan adalah pada cakupan masalah yang dibangun. Kelompok 1 secara konsisten mempersempit masalah. Isu yang sebenarnya kompleks (menyangkut hak anak, prioritas anggaran, kebijakan pangan, dan ruang demokrasi) direduksi menjadi persoalan etika dan kepastasan dalam menyampaikan kritik. Tema "etika kritik" dan "tanggung jawab" diulang berkali-kali, sementara substansi keberatan BEM UGM terhadap MBG hampir tidak pernah dibahas secara mendalam. Akibatnya, pembaca digiring untuk menilai bagaimana kritik disampaikan, bukan apa isi kritik tersebut.

Kelompok 2 juga mempersempit masalah, tetapi dengan cara yang berbeda. Fokus utama adalah pada validitas kritik dan legitimasi MBG. Pertanyaan yang diajukan secara implisit adalah: "Apakah tuduhan BEM UGM benar?" dan "Apakah MBG layak dipertahankan?" Dengan membingkai isu sebagai pertarungan antara narasi yang benar dan narasi yang keliru, kelompok 2 menggeser perhatian dari evaluasi kebijakan secara substantif ke pembelaan atas program pemerintah. MBG diposisikan sebagai program yang baik dan pro-HAM, sehingga kritik terhadapnya dianggap sebagai posisi yang bermasalah secara moral.

Sebaliknya, Kelompok 3 memperluas masalah. Isu baliho dan kritik BEM UGM tidak dilihat sebagai peristiwa terisolasi, tetapi sebagai gejala dari kegagalan struktural yang lebih besar. Dengan menghubungkan kritik mahasiswa dengan tragedi bunuh diri anak di NTT, kelompok 3 membangun tema bahwa persoalan utamanya adalah prioritas negara yang keliru: lebih fokus pada program-program simbolik daripada hak dasar anak. Cakupan masalah yang diperluas ke forum internasional (UNICEF, "percakapan pemimpin dunia") semakin memperkuat narasi bahwa ini adalah persoalan serius yang membutuhkan perhatian global.

Perbandingan Retoris

Tabel 5. Perbandingan Retoris Antar Kelompok Media

Indikator	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Diksi kunci	"etika", "adab", "cek", "sah-sah saja", "tanggung jawab"	"bantah", "narasi", "menyesatkan", "menentang HAM", "program yang baik"	"kegagalan negara", "hak dasar anak", "jurang besar", "percakapan dunia", "kejahatan tak"

Nada bahasa	Menertibkan, menenangkan, administratif	Korektif, defensif, legitimatif	termaafkan" Kritis, alarmis, problematis
Label moral	Pengkritik diingatkan soal kepatantasan	Penolak/pengkritik dilekatkan pada posisi keliru secara moral	Negara dilekatkan pada kegagalan, krisis, tanggung jawab kemanusiaan
Efek pada pembaca	Digiring ke stabilisasi isu dan batas etika	Digiring menerima pembelaan kebijakan sebagai posisi rasional	Digiring melihat isu sebagai problem struktural yang mendesak

Sumber: Diolah peneliti dari hasil analisis 14 teks berita.

Pada level retorik, perbedaan diksi kunci antar kelompok sangat mencolok dan menunjukkan posisi ideologis masing-masing media. Kelompok 1 menggunakan kata-kata yang bersifat normatif dan administratif: "etika", "adab", "cek", "sah-sah saja", "tanggung jawab". Pilihan kata ini menciptakan nada bahasa yang menertibkan dan menenangkan. Pemerintah tampil sebagai pihak yang rasional dan berusaha menjaga ketertiban, sementara pengkritik diingatkan secara halus tentang batas-batas kepatantasan. Efek pada pembaca adalah stabilisasi isu—pembaca merasa bahwa masalah sedang ditangani dengan baik oleh negara, dan yang diperlukan hanyalah kepatuhan pada norma etika.

Kelompok 2 menggunakan diksi yang lebih konfrontatif dan defensif: "bantah", "narasi", "menyesatkan", "menentang HAM", "program yang baik". Kata "narasi" di sini penting karena mengandung implikasi bahwa kritik BEM UGM bukanlah fakta, melainkan konstruksi yang bisa diperdebatkan. Kata "menyesatkan" dan "menentang HAM" membawa muatan moral yang kuat, menempatkan pengkritik pada posisi yang keliru bahkan berbahaya. Nada bahasa yang korektif dan legitimatif ini mengarahkan pembaca untuk menerima pembelaan kebijakan sebagai posisi yang rasional dan bermoral.

Kelompok 3 menggunakan diksi yang paling tajam dan evaluatif: "kegagalan negara", "hak dasar anak", "jurang besar", "percakapan dunia", "kejahatan tak termaafkan". Kata "kegagalan" dan "krisis" menempatkan negara pada posisi yang harus bertanggung jawab, bukan sebagai penengah yang netral. Kata "kejahatan tak termaafkan" membawa muatan moral yang sangat kuat dan bersifat menghakimi. Nada bahasa yang kritis, alarmis, dan problematis ini mengarahkan pembaca untuk melihat isu sebagai problem struktural yang mendesak—bukan sekadar polemik kebijakan biasa, melainkan persoalan hak asasi yang membutuhkan tindakan segera.

SINTESIS TEMUAN

Berdasarkan perbandingan pada keempat struktur framing di atas, dapat disintesis bahwa kontestasi narasi kebijakan publik pada kasus kritik BEM UGM terhadap MBG berlangsung dalam tiga pola besar yang saling berkompetisi.

Pertama, kelompok media yang menempatkan pejabat negara di depan berita (Kelompok 1) cenderung mengubah fokus dari substansi kritik ke tata cara kritik. Melalui pemilihan aktor depan (Istana, Mensesneg), alur cerita yang berpusat pada respons dan pengecekan, tema etika yang diulang-ulang, serta diksi normatif seperti "etika" dan "tanggung jawab", kelompok ini membangun realitas bahwa persoalan utama dalam isu ini adalah bagaimana kritik seharusnya disampaikan, bukan apa isi kritik itu sendiri.

Kedua, kelompok media yang membela MBG secara eksplisit (Kelompok 2) mengonstruksi kritik sebagai narasi yang keliru, menyesatkan, atau bertentangan dengan kepentingan publik. Melalui headline konfrontatif, alur yang bersifat defensif, tema pembelaan kebijakan, serta diksi seperti "bantah" dan "menyesatkan", kelompok ini mbingkai kritik BEM UGM sebagai sesuatu yang perlu diluruskan, bukan sebagai masukan yang perlu dipertimbangkan.

Ketiga, kelompok media yang memberi ruang lebih besar pada BEM UGM dan tragedi anak di NTT (Kelompok 3) cenderung menempatkan polemik ini sebagai persoalan hak dasar, prioritas negara, dan kegagalan struktural. Melalui pemilihan aktor depan (BEM UGM, UNICEF), alur yang berpusat pada kronologi kemanusiaan, tema kritik struktural, serta diksi tajam seperti "kegagalan negara" dan "kejahatan tak termaafkan", kelompok ini membangun realitas bahwa pemerintah berada pada posisi yang perlu menjawab substansi kritik, bukan sekadar mengatur tata caranya.

Dengan demikian, satu episode isu yang sama klarifikasi pemerintah atas kritik BEM UGM terhadap MBG menghasilkan peta framing yang tidak tunggal, melainkan berlapis dan saling berkompetisi. Perbedaan framing ini bukan sekadar hasil perbedaan gaya jurnalistik atau selera redaksional, melainkan cerminan dari perbedaan cara media memosisikan pemerintah, mahasiswa, dan publik dalam konflik kebijakan. Temuan ini sekaligus menegaskan relevansi model Pan dan Kosicki (1993) dalam membedah kontestasi narasi kebijakan publik di era media digital, di mana struktur sintaksis menentukan siapa yang diberi otoritas membuka makna, struktur skrip menentukan urutan fakta yang mengarahkan simpati pembaca, struktur tematik menentukan gagasan mana yang diulang sebagai tema utama, dan struktur retorik menentukan kata-kata kunci yang menguatkan posisi ideologis media.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis framing terhadap 14 teks berita dari 13 media online yang memberitakan klarifikasi pemerintah atas kritik BEM UGM terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada periode 6–25 Februari 2026, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satu pun media yang memberitakan klarifikasi pemerintah secara netral. Seluruh teks berita membangun realitas melalui seleksi fakta, penempatan sumber, dan pilihan diksi yang membawa kepentingan tertentu. Kelompok 1 yang terdiri dari sembilan media menonjolkan respons Istana dan pejabat negara dengan dominasi framing normatif yang menekankan etika, adab, dan tata cara kritik, sehingga substansi kritik BEM UGM mengenai kegagalan prioritas negara terhadap hak dasar anak tersisih ke latar belakang. Kelompok 2 yang terdiri dari dua teks Republika mbingkai klarifikasi sebagai bantahan teknis dan moral, di mana kritik BEM UGM diposisikan sebagai



narasi yang keliru atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebaliknya, Kelompok 3 yang terdiri dari Tempo, tvOneNews.com, dan Suara.com membingkai klarifikasi dengan memberi ruang lebih besar pada sudut pandang BEM UGM, tragedi anak di NTT, dan problem hak dasar anak, sehingga pemerintah justru berada pada posisi yang perlu menjawab substansi kritik.

Perbandingan antarkelompok media memperlihatkan bahwa kontestasi narasi kebijakan publik berlangsung pada keempat struktur framing Pan dan Kosicki. Pada struktur sintaksis, perbedaan paling tegas terletak pada siapa yang ditempatkan sebagai aktor pertama di headline dan lead. Kelompok 1 dan 2 menempatkan pejabat negara atau pembela kebijakan di depan, sementara Kelompok 3 menempatkan BEM UGM, korban tragedi anak, atau tindakan advokasi sebagai pintu masuk berita. Pada struktur skrip, Kelompok 1 dan 2 membangun alur cerita yang berpusat pada respons, pengecekan, dan bantahan, sedangkan Kelompok 3 membangun alur yang berpusat pada kronologi kemanusiaan, surat ke UNICEF, dan perluasan isu ke forum global. Pada struktur tematik, Kelompok 1 mempersempit masalah menjadi persoalan etika dan kepantasan, Kelompok 2 mempersempit masalah menjadi validitas kritik dan legitimasi MBG, sementara Kelompok 3 memperluas masalah ke isu hak dasar anak, kegagalan prioritas negara, dan krisis kemanusiaan. Pada struktur retorik, diksi kunci masing-masing kelompok menguatkan posisi ideologisnya: Kelompok 1 menggunakan kata "etika", "adab", dan "tanggung jawab"; Kelompok 2 menggunakan kata "bantah", "menyesatkan", dan "menentang HAM"; sedangkan Kelompok 3 menggunakan kata "kegagalan negara", "hak dasar anak", dan "kejahatan tak termaafkan".

Penelitian ini membuktikan bahwa fase klarifikasi pemerintah pasca-kritik mahasiswa bukanlah sekadar pemberian informasi faktual, melainkan arena perebutan makna yang aktif. Pemerintah melalui media Kelompok 1 dan 2 berupaya merebut kembali definisi masalah dengan mengalihkan fokus dari substansi kritik ke tata cara kritik serta pembelaan teknis dan moral atas kebijakan, sementara Kelompok 3 mempertahankan narasi tandingan yang menempatkan kritik BEM UGM sebagai alarm moral yang sah dan mendesak. Dengan demikian, klarifikasi pemerintah dalam 14 teks berita yang diteliti tidak hadir sebagai satu suara tunggal, melainkan sebagai medan pertarungan di mana pemerintah ditempatkan secara berbeda: sebagai penertib etika kritik, sebagai pembela kebijakan yang sah, atau sebagai pihak yang justru harus menjawab kegagalan struktural. Temuan ini sekaligus memperkuat relevansi model framing Pan dan Kosicki untuk membaca kontestasi narasi kebijakan publik di era media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggelina, F., Ernanda, E., & Triandana, A. (2023). Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Pemberitaan Konflik Indonesia-West Papua di Portal Detik.com dan Asia Pacific Report.nz. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 2(2), 122–140. <https://doi.org/10.22437/kalistra.v2i2.23182>
- Arianti, G., Irfan, E., Haroni, N., & Rizqullah, M. S. (2025). Analisis framing berita di media lembaga pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 29(1), 29–45.
- aulia, S. (2022). Pan Kosicki framing analysis about sexual harassment in Riau



- University on Kompas.com and Tribunnews.com. . *Semiotika Jurnal Komunikasi*, 16(1).
- Bramantyo, B. D., Alida, M., & Pratiwi, D. (2025). Analisis framing Zhondang Pan & Kosicki dalam pemberitaan kenaikan PPN 12% di media Kompas.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 104–121.
- Devi Triana, F. R., & Amali, M. T. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Program Kerja Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dalam Media Online Liputan6.Com Dan Republika.co.id. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 603–614. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3231>
- Fahlevi, F., & Nusa, Moh. Z. R. (2026). Analisis Wacana Kritis Van Dijk Terhadap Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Podcast Bocor Alus Politik Tempo. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 6(1), 359–370. <https://doi.org/10.54082/jupin.1699>
- Firmansyah, T. (2026). *Wakil Kepala BGN Bantah Narasi BEM UGM Terkait Keuntungan Mitra MBG*. . Republika Online.
- Jayawinangun, R., & Nugroho, D. R. (2025). Pengaruh media digital, kesadaran, dan pengetahuan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi Dan Media*, 29(1), 16–28.
- juditha, C., & darmawan, J. J. (2026). Makan bergizi gratis program: News framing on news portals and netizen sentiment on social media. . *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 29(2), 165–180.
- Novilia, K., Assadiyah, D., & Novianti, S. (2025). Framing program makan bergizi gratis dan citra pemerintah Provinsi Lampung di media daring lokal. . *Kontekstual: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2).
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Saubani, A. (2026). *Menteri Pigai: Orang yang Mau Meniadakan MBG adalah Orang Menentang HAM*. *Republika Online*. . Republika Online.
- Tempo. (2026). *BEM UGM Surati UNICEF Setelah Tragedi Anak Bunuh Diri di NTT*. Tempo.Co.
- Vanti, M. E. D., Octaviani, V., & Maryaningsih, M. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Program Makan Gratis Prabowo Subianto Di Media Online. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6396>